



BAPENDA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAJAK KITA, UNTUK KITA

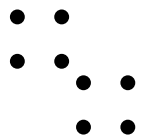


SK

PENETAPAN IKU DAN IKU



DISUSUN OLEH :
BADAN PENDAPATAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl Tulip No 9 Way Mengaku, Liwa 34812 Telp (0728) 21107

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/ 05 /KPTS /IV.02/2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka akuntabilitas pengukuran dan peningkatan kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029;

KEDUA : Semua Pejabat dan ASN sebagaimana Lampiran Keputusan ini berkewajiban melaksanakan Indikator Kinerja Individu dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahunan;

KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana diktum Kedua merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan organisasi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa

Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680701 198901 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 050/ 05 /KPTS /IV.02/2026
 TANGGAL 2 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					DEFINISI OPERASIONAL
				FERMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	Realisasi PAD Tahun ini dikurang Realisasi PAD Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi PAD Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	10	6,22	6,23	6,24	6,25	Persentase Peningkatan 9 Jenis Pajak Daerah Tahun berjalan
2.		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	Realisasi Retribusi Tahun ini dikurang Realisasi retribusi Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi retribusi Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	1	1	1	1	1	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bapenda	77	80	82	84	85	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

 Drs. DAMAN NASIR, M.P.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680701 198901 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Badan
 Tugas : Melaksanakan Tugas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - Pengoordinasian penyusunan perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FERMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	Realisasi PAD Tahun ini dikurang Realisasi PAD Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi PAD Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	10	6,22	6,23	6,24	6,25
2.		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	Realisasi Retribusi Tahun ini dikurang Realisasi retribusi Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi retribusi Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	1	1	1	1	1
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bapenda	77	80	82	84	85

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Sekretaris Badan
- Tugas : Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- Fungsi :
- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas
 - Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan
 - Pelayanan administrasi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Bapenda	70,69	70,69	70,69	70,69	70,69

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian
 Fungsi : - Pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan dan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{7}
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang di sediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	13 Unit	13 Unit	15 Unit	16 Unit	18 Unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipeliharaan	12 Unit	34 Unit	35 Unit	36 Unit	32 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian keuangan
 Fungsi :
 - Pengelolaan administrasi keuangan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Orang	25 Orang	27 Orang	30 Orang	32 Orang
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian Perencanaan
 Fungsi :
 - Pengelolaan administrasi Perencanaan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{6}	{7}	{8}	{9}
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
2.	Membantu Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan
Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pendataan di bidang pajak dan retribusi daerah
Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Pendataan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Pendataan;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak	15%	15%	15%	15%	15%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	77%	80%	82%	84%	85%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
Fungsi :
- Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 Tugas : Menyelenggarakan pendataan dan pendadftaran objek pajak daerah
 Fungsi :
 - Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
 - Pelaksanaan kebijakan sub bidang pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah ;

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2025	2025	2025	2025
{1}	{2}	{3}	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan
 Tugas : Menyelenggarakan penetapan dan penagihan bidang pajak dan retribusi daerah
 Fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan penagihan;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan penagihan;
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan penagihan.

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Peningkatan Potensi Objek Pajak yang meningkat setiap tahun	15%	15%	15%	15%	15%
		Persentase Penetapan Objek Pajak	8%	8%	8%	8%	8%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
Tugas : Menyelenggarakan penetapan pajak daerah
Fungsi :

- Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang penetapan pajak daerah
- Pelaksanaan kebijakan sub bidang penetapan pajak daerah ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
Tugas : Menyelenggarakan penagihan pajak daerah
Fungsi :
- Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang penagihan pajak daerah
- Pelaksanaan kebijakan sub bidang penagihan pajak daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Tugas : Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Cakupan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Tugas : Menyelenggarakan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sub bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan sub bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2028
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
2.	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Tugas : Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis sub bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan sub bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang optimal
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran pendapatan dan pengeolaan piutang daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perencanaan anggaran pendapatan dan pengeolaan piutang daerah;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2025	2025	2025	2025
{1}	{2}	{3}	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680701 198901 1 002